

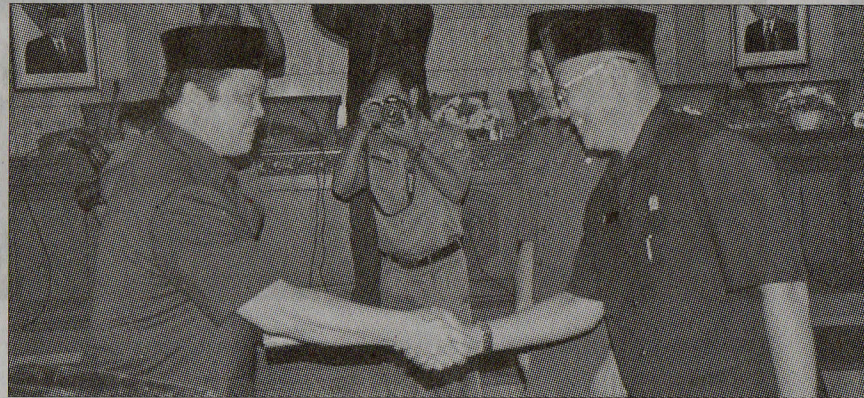
# Disetujui, Fraksi Soroti Kinerja Eksekutif

**MEMPAWAH-** Anggaran Daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, karena APBD sendiri setidaknya dapat dijadikan sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dengan kata Susanto SE MM. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan Pandangan umum (PU) fraksi tentang raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua H Rusli Abdullah dan H Amin HAM serta dihadiri Bupati beserta pimpinan SKPD, kemarin.

Raperda itu kata dia, merupakan kewajiban Kepala Daerah seperti diatur dalam Pasal 31 UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pembahasan raperda dimaknai sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menyadari demi perbaikan tata kelola keuangan daerah sebagai mitra penyelenggara pemerin-



HAMDAN PONTIANAKPOST

**PU:** Bupati Ria Norsan menerima pandangan umum dari enam fraksi DPRD tentang Raperda.

tahan di tingkat daerah, memberikan catatan, dimana selama 5 (lima) tahun LKPD Kabupaten Mempawah mendapat predikat Qualified Opinion (Wajar dengan Pengecualian).

“Predikat yang tanpa berubah itu, janganlah dimaknai sebagai prestasi yang kurang baik (tidak naik kelas-red),” pintanya. Melainkan jadi sebuah koreksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif untuk terus menerus melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Bagi kami Fraksi PDI Perjuangan adanya penurunan jumlah temuan dari tahun ke tahun telah menunjukkan ke arah tata kelola keuangan yang baik.

Terhadap beberapa masalah yang masih menjadi temuan BPK RI terutama pada pendataan dan pemanfaatan aset, seolah menjadi penyakit lama yang harus segera ditangani dan diselesaikan.

Selain itu masalah pengelolaan investasi non permanen yang Rp 7,7 Miliar terdiri dari DPMU-LUEP Rp 41.085.454, PER-Rp 830.582.630, LAPIM-Rp 1.829.750.000, DPMU- Rp 1.126.407.136, Penggaduhan

sapi-Rp 3.217.487.264 dan penggemukan sapi-Rp 713.082.000. FPI Perjuangan melihat, kondisi itu masih sama dengan laporan keuangan per 31 Desember 2010 lalu, kendati ada penurunan investasi karena angkanya kecil.

“Padahal investasi itu kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diharapkan dapat bergulir. Faktanya tidak bisa berjalan, bahkan kesannya tidak ada upaya penagihan terhadap para debitur-debitur nakal,” tandas Susanto yang juga menyampaikan HUT Bhayangkara ke 66 semoga Polri semakin jaya, profesional dan humanis.

Selain itu, juga disoroti mengenai penyajian Laporan Keuangan PDAM yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam PP no 71 tahun 2010, dan masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP no 24 tahun 2005 yang masih menggunakan metode biaya (cost). Apakah tenaga keuangan di PDAM belum pernah mengikuti bimtek keuangan khususnya pembuatan laporan keuangan. Terhadap penjualan aset daerah berupa dua unit mobil senilai Rp 126 juta hingga belum ditagih. “Fraksi menilai ini bukan tanpa alasan, karena piutang daerah itu nilainya masih sama dengan tahun lalu,” sorotnya. (ham)